

Pengelolaan SDA dan Lingkungan

Rokhmin Dahuri

Guru Besar Manajemen Pembangunan Pesisir dan Lautan IPB
Ketua Umum Gerakan Nelayan Tani Indonesia

KITA bersyukur sejak merdeka bangsa Indonesia mengalami perubahan hampir di semua bidang kehidupan. Namun, sudah 73 tahun merdeka, Indonesia masih sebagai negara berkembang berpendapatan menengah bawah, dengan pendapatan nasional per kapita. Belum menjadi negara maju dan makmur, dengan pendapatan nasional kotor di atas US\$12 ribu per kapita.

Pada hal, Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam (SDA) yang cukup lengkap dan melimpah. Dan, terletak di jantung rantai suplai global, dengan 45% total barang yang diperdagangkan di dunia bernilai US\$15 triliun per tahun dikapalkan melalui laut Indonesia.

Oleh sebab itu, pasti ada yang salah dengan cara-cara kita membangun bangsa ini. Kekayaan alam dan kesuburan

lahan bukannya kita syukuri dengan memantaatkannya secara optimal bagi kemajuan dan kesejahteraan bangsa, tetapi justru menjadi semacam 'kurungan' (*curse*).

Kurungan itu berupa kemalasan dan tumpulnya kreativitas serta daya inovasi mayoritas komponen bangsa. Mentalitas kebanyakan pengusaha hanya mengejar keuntungan pribadi, tanpa peduli dengan kemajuan bangsa dan kesejahteraan rakyat. Mereka merasa nyaman mengeksplor komoditas mentah, tanpa mengolahnya menjadi beragam produk bernilai tambah dan berdaya saing tinggi. Sejumlah komoditas yang total produksinya lebih besar dari kebutuhan nasional (seperti beras, jagung, garam, dan ikan) pun mereka impor, di kala para petani dan nelayan kita sedang panen raya.

Tidak kondusif

Di era globalisasi dan perda-

ngan bebas, mestinya mereka menggenjot produksi barang dan jasa yang lebih berdaya saing untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dan ekspor. Mereka malah mengurangi kapasitas produksi, bahkan menutup pabriknya, dan beralih menjadi importir barang dan jasa.

Mereka pun sering kali membangun atau berkebudai di kawasan lindung atau kawasan lain yang tidak sesuai dengan RTRW. Mereka membuang limbah dan emisi karbon yang melebihi kapasitas asimilasi ekosistem alam.

Akabarnya, banyak wilayah yang tercemar berat. Sungai Citarum menjadi sungai terkontaminasi kedua di dunia, hanya kalah dari Sungai Gangga di India. Deforestasi secara masif, penebangan pohon hutan dan cara bertani yang tidak sesuai dengan asas konservasi telah mengakibatkan kebakaran hutan, banjir, dan tanah longsor.

Rendahnya jiwa nasionalisme para pengusaha di atas sangat boleh jadi lantaran ulah para pejabat negara, kepala

daerah, dan elite politik yang membuat kebijakan, regulasi, dan iklim investasi yang tidak kondusif bagi para pengusaha (*entrepreneur*) untuk membangun industri dan bisnis yang dapat memproduksi barang dan jasa bernilai tambah serta berdaya saing tinggi.

Hampir semua proyek strategis nasional, seperti Melkarta, PLTU Riau-1, E-KTP, dan sejumlah proyek PUPR harus melalui *backing* orang kuat dan 'sogokan'. Selain, prosesnya sangat lama, pekerjaan pembangunannya menjadi biaya tinggi (*high cost economy*). Praktik kolusi dan korupsi semacam inilah yang mengakibatkan harga listrik, gas, dan jasa lainnya menjadi sangat mahal. Dan, ujungnya membuat ekonomi Indonesia kurang kompetitif.

Sejak era desentralisasi, banyak kepala daerah yang mengeluarkan izin HPH, perkebunan, dan tambang lebih dari satu surat izin untuk satu bidang lahan yang sama. Kawasan lindung dengan mudahnya mereka alih fungsikan untuk kawasan industri, tambang, dan peruntukkan lahan lainnya,

dengan imbalan miliaran sampai triliunan rupiah.

SDA sebagai berkah

Oleh sebab itu, mari kita kembali ke Pasal 33 UUD 1945, bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat'. Maksudnya, migas, batubara, mineral, hutan, dan SDA milik bersama lainnya harus dimanfaatkan dan dikelola pemerintah cq BUMN dan BUMD. Sudah barang tentu, BUMN dan BUMDnya harus dikelola secara profesional.

Kalaupun pengeloalannya diserahkan kepada swasta, negara harus mendapatkan porsi keuntungan lebih besar dan memegang penuh kedaulatan. Sebaiknya, korporasi besar bernitra dengan masyarakat sekitar secara *wir-wih* dan saling menghormati.

Pada tataran praktis, semua kegiatan produksi dan pengolahan SDA harus sesuai dengan RTRW. Semua batu bara berteknologi rendah harus dijadikan gas dan digunakan untuk

memasok kebutuhan energi dalam negeri. Dengan PLTU yang lebih ramah lingkungan, seperti teknologi *super critical*, batu bara berteknologi tinggi pun mesti diprioritaskan untuk membangkitkan PLTU dalam negeri. Sehingga, sebagian besar produk minyak bumi bisa kita ekspor, dan gas bisa dihilirisasi untuk menghasilkan pupuk, polietilen, dan produk petrokimia lainnya. Mulai sekarang kita akselerasi pengembangan dan penggunaan energi terbarukan.

Pengembangan hilirisasi semua komoditas mentah menjadi berbagai produk hilir yang bernilai tambah dan berdaya saing tinggi. Pastikan bahwa tingkat pemanaman pohon hutan, ikan, dan SDA terbarukan lainnya harus tidak melebihi potensi produksi lestarinya. Eksploitasi, produksi, dan distribusi SDA tidak terparakan harus dilakukan secara ramah lingkungan. Sebagian keuntungannya digunakan untuk mengembangkan material alternatif dan ekonomi wilayah yang lebih produktif dan menyejahterakan masyarakat sekitar secara berkelanjutan. Kemudian semua unit usaha harus: (1) memenuhi *economy of scale*; (2) menerapkan *integ-*

rate system hilir logi ling Per dan pern tri, g harv ngar mika Pe mest reus men limb ling upay terha nam alant Ak kan tasi i pela dika poli dukto nglo di at Se pres 17 A men an' Ind mak